

Analisis Manajemen Pembiayaan di SMP Negeri 40 Kota Bandung

Riestha Sugianti¹, Suryadi², Fitroh Hayati³

^{1,2,3} Magister Pendidikan Islam, Universitas Islam Bandung

^{*1}riestha17.rs@gmail.com, ²suryadi@upi.edu, ³fitroh@unisba.ac.id

Abstrak

Penelitian ini menganalisis kebijakan pembiayaan standar yang diterapkan pada SMP Negeri 40 Kota Bandung tahun 2023. Setiap satuan pendidikan membutuhkan biaya operasional untuk menjalankan program-program yang telah terjadwal, program-program baru yang akan dilaksanakan, serta kegiatan-kegiatan perencanaan untuk pengembangan sekolah di masa depan. Kebijakan biaya sekolah dasar ditetapkan dengan memperhatikan pedoman teknis penggunaan dana BOS untuk memastikan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan sekolah, sekolah memiliki kewenangan untuk mengelola biaya operasional pendidikan menengah, namun dalam pelaksanaannya harus selalu berpedoman pada ketentuan yang telah ditetapkan. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan wawancara dan observasi. Berdasarkan temuan penelitian, sumber pembiayaan pendidikan yang paling dominan adalah dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dengan alokasi sebesar Rp 1.084.761.343. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah melalui program BOS memberikan kontribusi yang sangat signifikan dalam menjamin keberlangsungan proses belajar-mengajar di sekolah. Pelaksanaan pembiayaan pendidikan diawali dengan proses perencanaan yang tertuang dalam Rencana Kerja Sekolah (RKS) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS).

Kata Kunci: Manajemen Pembiayaan, Pendidikan Menengah Negeri, Kualitatif

Abstract

This research analyzes the standard financing policy implemented at SMP Negeri 40 Bandung City in 2023. Each educational unit requires operational costs to carry out scheduled programs, new programs that will be implemented, as well as planning activities for school development in the future. The elementary school fee policy is determined by taking into account the technical guidelines for the use of BOS funds to ensure the efficiency and effectiveness of school financial management. Schools have the authority to manage secondary education operational costs, but in implementation they must always be guided by the provisions that have been determined. The method used is qualitative with interviews and observations. Based on research findings, the most dominant source of education financing is School Operational Assistance (BOS) funds, with an allocation of IDR 1,084,761,343. This shows that the government through the BOS program makes a very significant contribution in ensuring the continuity of the teaching and learning process in schools. Implementation of education financing begins with a planning process contained in the School Work Plan (RKS) and School Activity and Budget Plan (RKAS).

Keywords: Financing Management, State Secondary Education, Qualitative

1. Pendahuluan

Pendidikan berperan sebagai katalisator dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sehingga mampu memberikan kontribusi positif bagi pembangunan bangsa dan negara, pendidikan merupakan fondasi bagi pembangunan berkelanjutan, karena mampu menghasilkan sumber daya manusia yang inovatif dan adaptif terhadap perubahan. Biaya operasional pendidikan merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan suatu

lembaga pendidikan. Pendidikan sebagai investasi jangka panjang memerlukan dukungan finansial yang berkelanjutan (Nitiswara, 2015).

Manajemen adalah proses dinamis yang melibatkan interaksi antara manusia, teknologi, dan lingkungan. Tujuannya adalah untuk menciptakan nilai tambah bagi organisasi dan pemangku kepentingan (Tajudin, 2020). Sumber Daya Manusia adalah faktor penentu keberhasilan dalam menciptakan lingkungan belajar yang efektif dan produktif. Manajemen pendidikan bertujuan untuk memastikan bahwa setiap peserta didik memiliki kesempatan yang sama untuk belajar dan berkembang secara optimal (Kuntoro, 2019).

Berdasarkan pandangan Sudarmono, pembiayaan pendidikan mencakup seluruh proses penganggaran, pengalokasian, dan pemanfaatan sumber daya finansial dalam penyelenggaraan pendidikan. Distribusi sumber daya pendidikan yang tidak merata seringkali disebabkan oleh perbedaan dalam alokasi anggaran antara satu sekolah dengan sekolah lainnya (Sudarmono, 2021).

Pendanaan sekolah merupakan komponen integral dalam sistem pendidikan, yang mencakup perencanaan, penganggaran, dan pengelolaan sumber daya keuangan untuk mendukung proses pembelajaran. Program pinjaman pendidikan tidak hanya memberikan akses finansial bagi individu untuk melanjutkan studi, tetapi juga menciptakan rasa tanggung jawab dan komitmen untuk berhasil. Dengan demikian, program ini dapat berfungsi sebagai katalisator perubahan perilaku, mendorong individu untuk lebih disiplin, mandiri, dan berorientasi pada tujuan.

PP nomor 6 tahun 2021 dirincikan tentang petunjuk teknis pengelolaan dana bantuan operasional sekolah reguler. Dana Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disebut Dana BOS adalah dana yang digunakan terutama untuk mendanai belanja nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah sebagai pelaksana program wajib belajar dan dapat dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dana BOS Reguler adalah Dana BOS yang dialokasikan untuk membantu kebutuhan belanja operasional seluruh peserta didik pada satuan pendidikan dasar dan menengah.

Pembiayaan yang memadai merupakan syarat mutlak untuk menyediakan fasilitas belajar yang layak, guru yang berkualitas, dan program pendidikan yang inovatif. Pendidikan, sebagai sebuah sistem yang kompleks, memerlukan dukungan finansial yang memadai untuk dapat berjalan dengan efektif. Mulai dari pembangunan gedung sekolah, pengadaan sarana dan prasarana, pembayaran gaji guru, hingga pengembangan kurikulum, semuanya membutuhkan biaya. Keterbatasan dana pendidikan mengharuskan adanya perencanaan yang matang dan pengelolaan yang hati-hati agar setiap rupiah yang dikeluarkan dapat memberikan dampak yang maksimal bagi peningkatan kualitas pendidikan (Aprima Vista, 2020).

Pendidikan yang berkualitas adalah investasi jangka panjang yang memberikan manfaat bagi individu, masyarakat, dan negara. Namun, untuk mencapai kualitas tersebut, diperlukan biaya yang tidak sedikit. Kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan dan kesediaan mereka untuk berkontribusi secara finansial akan mendorong terciptanya sistem pendidikan yang lebih baik.

Pengelolaan keuangan sekolah dimulai dari sumber-sumber pendapatan hingga penggunaannya. Dana yang diperoleh digunakan untuk menjalankan semua program yang telah direncanakan, mulai dari kegiatan belajar-mengajar hingga pengembangan

fasilitas sekolah. Sekolah sebagai institusi pendidikan memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dengan demikian, pembiayaan yang efektif akan berkontribusi pada peningkatan kualitas pendidikan secara keseluruhan (Yuliani, 2016).

Berdasarkan pengamatan di lapangan, dapat disimpulkan bahwa manajemen pembiayaan merupakan aspek yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Sekolah membutuhkan dana untuk menjalankan berbagai kegiatan operasional, seperti pembayaran gaji, pemeliharaan fasilitas, dan pembiayaan program-program pendidikan lainnya. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa sekolah tidak dapat beroperasi tanpa adanya pengelolaan keuangan yang baik. Dana yang diperoleh sekolah digunakan untuk berbagai keperluan, seperti pembayaran gaji guru dan staf, pembelian peralatan, pemeliharaan gedung, serta pengembangan program-program pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan merupakan faktor kunci dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan di sekolah (Yulianti, 2017).

Realisasi anggaran sekolah yang dilaporkan melalui Laporan Pertanggungjawaban merupakan bukti transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan sekolah. Hal ini penting untuk memastikan bahwa dana yang diterima digunakan secara efektif dan efisien untuk kepentingan peserta didik. Dana BOS merupakan alokasi dana yang fleksibel dan dapat digunakan oleh sekolah untuk membiayai berbagai kegiatan operasional yang mendukung penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas, terutama dalam rangka pelaksanaan program wajib belajar. Dana BOS bertujuan untuk mendukung program wajib belajar 12 tahun, mencakup pendidikan dasar dan menengah, dengan fokus pada pencapaian Standar Nasional Pendidikan yang berkualitas.

Untuk menunjang keberlangsungan program-program sekolah yang berkualitas, dibutuhkan dana operasional yang lebih signifikan dibandingkan dengan sekolah menengah pertama pada umumnya. Dan pembiayaan pada SMP Negeri 40 Kota Bandung tidak semua kebutuhan akan bahan ajar dan kegiatan penunjang dapat terpenuhi secara optimal.

Mengacu pada kajian literatur yang telah dilakukan, penelitian ini bertujuan untuk mendalami praktik manajemen pembiayaan pendidikan di SMP Negeri 40 Kota Bandung, dengan tujuan untuk memberikan kontribusi pada bidang pendidikan, penulis menyusun artikel ini dengan berjudul " *Analisis Manajemen Pembiayaan di SMP Negeri 40 Kota Bandung*".

Sejalan dengan uraian sebelumnya, tujuan penelitian ini difokuskan pada : (1) Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan anggaran pendidikan di SMP Negeri 40 Kota Bandung ; (2) menganalisis mekanisme penganggaran dan pengalokasian dana pendidikan di SMP Negeri 40 Kota Bandung; (3) Mengidentifikasi kendala utama dan faktor pendukung dalam implementasi manajemen pembiayaan di SMP Negeri 40 Kota Bandung.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan fokus pada pemaparan tentang pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di tingkat sekolah menengah pertama. Data dalam penelitian ini dikumpulkan dari tiga sumber utama, yaitu sumber daya manusia, lingkungan observasi, dan dokumen-dokumen.

Subjek penelitian ini, yaitu kepala sekolah, bendahara sekolah, dan guru, menjadi sumber data utama yang memberikan informasi mendalam tentang praktik manajemen pembiayaan sekolah di lembaga pendidikan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan multi-metode dengan menggabungkan teknik observasi, wawancara, dan analisis dokumen. Analisis data kualitatif dalam penelitian ini dilakukan secara interaktif dan berkelanjutan, dimulai dari pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, dilanjutkan dengan reduksi data, penyajian data dalam bentuk naratif, dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan berdasarkan temuan-temuan yang muncul.

Analisis data kualitatif deskriptif digunakan untuk memahami makna di balik data yang diperoleh dari wawancara dan observasi. Proses analisis data kualitatif merupakan proses yang dinamis dan berulang, di mana peneliti secara terus-menerus merevisi pemahamannya terhadap data seiring dengan berjalannya penelitian. Analisis data dalam penelitian ini akan mengadopsi model analisis data kualitatif yang diusulkan oleh Miles dan Huberman, proses analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berulang, dengan tujuan mencapai kedalaman pemahaman yang maksimal. Ketiga tahapan utama dalam analisis data kualitatif, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi, saling berinteraksi dan membentuk siklus analisis yang integral (Sugiyono, 2015).

Tahapan awal analisis data adalah mereduksi data mentah dari catatan lapangan menjadi data yang lebih terfokus dan terstruktur. Data yang telah direduksi kemudian akan disusun menjadi sebuah narasi yang koheren. Terakhir, akan menarik kesimpulan berdasarkan narasi tersebut dan memverifikasinya dengan data yang ada.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perencanaan dalam manajemen pembiayaan pendidikan adalah upaya mengelola sumber daya keuangan secara sistematis untuk menjamin kelancaran proses pembelajaran dan pencapaian tujuan pendidikan. Perencanaan pembiayaan pendidikan adalah proses menyusun anggaran yang detail untuk semua kegiatan pendidikan. Anggaran ini berfungsi sebagai pedoman untuk memastikan bahwa sumber daya yang ada digunakan secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan (Suryadi, 2020).

Pengawasan terhadap penggunaan dana pendidikan di sekolah dilakukan secara berlapis, mulai dari kepala sekolah, dinas pendidikan, hingga lembaga pemeriksa keuangan negara. Dana BOS, sebagai salah satu sumber utama dana pendidikan dari pemerintah, menjadi fokus pengawasan yang ketat. Pengawasan keuangan ini memiliki tujuan strategis untuk menjaga integritas pengelolaan keuangan, mendorong tata kelola yang baik, serta memastikan tercapainya tujuan pendidikan secara optimal agar : (1) setiap langkah dalam pelaksanaan anggaran sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan (2) pelaksanaan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip yang berlaku (3) hambatan dan kelemahan dalam pekerjaan dapat diantisipasi dan diatasi dan (4) pekerjaan bisa selesai dengan cepat, baik, dan tepat waktu (Yulianti, 2017).

Melalui wawancara dengan pihak yang berwenang mengelola anggaran pendidikan, yaitu Seksi Administrasi dan Bendahara BOS, diketahui bahwa sumber dana yang digunakan adalah dana dari Bantuan Operasional Sekolah. Hal ini didukung oleh

keterangan dari beberapa orang yang kami wawancarai terkait yang senada dengan informasi mengenai sumber anggaran pendidikan yang telah disampaikan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Seksi Administrasi dan Bendahara BOS, alokasi anggaran pendidikan sangat beragam, mencakup kebutuhan pokok sekolah seperti pengembangan infrastruktur, pengadaan barang dan jasa, serta pelaksanaan kegiatan yang telah terprogram. Dana yang diterima digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS), meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana, pembayaran gaji guru dan tenaga kependidikan, serta pengadaan barang dan jasa untuk mendukung proses pembelajaran.

Tabel 1 Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun 2023

Saldo periode sebelumnya	Rp. 38.657
Total penerimaan dana BOSP periode ini	Rp. 1.084.761.343
Total penggunaan dana BOSP periode ini	Rp. 1.084.625.000
Akhir saldo BOSP periode ini	Rp. 175.000

Tabel 2 REKAPITULASI REALISASI PENGGUNAAN DANA BOSP TAHUN 2023
 PERIODE TANGGAL : 01 Januari 2023 s/d s/d 31 Desember 2023

No urut	7 Standar	Sub Program	Jumlah	Jumlah Total
1	Pengembangan Standar Isi	Pengembangan Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	21.525.600	21.525.600
2	Pengembangan Standar Proses	1. Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler. 2. Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah.	70.785.700 723.600	71.509.300
3	Pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan	Pengembangan Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	29.690.000	29.690.000
4	Pengembangan sarana dan prasarana sekolah	1. Pengembangan Perpustakaan 2. Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler 3. Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah 4. Pembiayaan Langganan Daya dan Jasa 5. Penyediaan Alat Multi Media Pembelajaran	98.219.000 9.518.250 9.518.250 162.545.860 45.844.000	356.196.010
5	Pengembangan standar pengelolaan	1. Penerimaan Peserta Didik Baru 2. Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler	28.104.600 5.678.500 9.093.500	371.749.090

		3. Pelaksanaan Kegiatan Asesmen/Evaluasi Pembelajaran	245.201.500	
		4. Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah	83.670.990	
		5. Pembiayaan Langganan Daya dan Jasa		
6	Pengembangan standar pembiayaan	1. Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah	2.400.000	147.000.000
		2. Pembayaran Honor	144.600.000	
7	Pengembangan dan implementasi sistem penilaian	1. Pelaksanaan Kegiatan Asesmen/Evaluasi Pembelajaran	50.861.000	86.955.000
		2. Pengembangan Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	36.094.000	
	Jumlah Pengeluaran			1.084.625.000

Dari rincian pada Tabel 1, dapat disimpulkan bahwa dana yang diterima berasal dari BOS SMP Negeri 40 Kota Bandung Rp. 1.200.000,- per peserta didik di Tahun 2023 sebanyak 904 peserta didik baik kelas VII, VIII dan IX adalah Rp.1.084.800.000 per tahun dan dikurangi dari sisa saldo Tahun 2022 yaitu Rp. 38.657,- maka penerimaan BOS Tahun 2023 adalah Rp. 1.084.761.343.

Hasil wawancara dengan seksi administrasi dan bendahara BOS menunjukkan bahwa alokasi dana pendidikan sangat beragam. Dana tersebut digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan sekolah, mulai dari pembangunan sarana dan prasarana, pengadaan barang dan jasa, hingga pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan. Dana yang diterima digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS), meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana, pembayaran gaji pendidik dan tenaga kependidikan honorer, serta pengadaan barang dan jasa untuk mendukung proses pembelajaran.

RAKS Tahun 2023 untuk pencairannya mendapatkan 3 kali dalam satu tahun. Dan masih ada keterlambatan, untuk pencairan pertama dibulan Maret, pencairan ke dua di bulan Agustus dan pencairan ke tiga di bulan November. Anggaran sudah mencukupi karena memang mendapatkan Rp. 1.200.000,- per peserta didik, tetapi untuk anggaran awal tidak langsung sesuai ada pengeluaran penting di 3 bulan pencairan ada perubahan dan pergeseran. Pergeseran itu ada tiga kali dalam satu tahun dan perubahan ada satu kali dalam satu tahun. Untuk anggaran satu tahun itu harus tercover semua kegiatan di sekolah, dikarenakan ada RKJM yaitu Rencana Kerja Jangka Menengah yang empat tahun dan RKAT adalah Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan sehingga RAKS mengikuti RKJM dan RKAT.

Rencana jangka menengah yang menjabarkan visi, misi, dan strategi untuk mencapai mutu lulusan yang lebih baik, termasuk perbaikan kurikulum, sarana prasarana, kualitas pengajar, dan sistem penilaian. Pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan (RKT) didasarkan pada kerangka acuan yang telah ditetapkan dalam rencana jangka menengah. Kepala sekolah beserta seluruh pemangku kepentingan di sekolah secara kolaboratif merumuskan rencana kerja sekolah. Rencana ini disusun dengan tujuan

utama untuk meningkatkan mutu pendidikan dan membentuk karakter peserta didik. Sesuai dengan amanat Undang-Undang, pendidikan nasional bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik menjadi manusia Indonesia yang beriman, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab (20, 2003)

Penyusunan rencana kerja jangka menengah bertujuan untuk: (1) Dengan menyusun rencana yang detail dan realistis, kita dapat meningkatkan peluang keberhasilan program sekolah dan meminimalisir risiko terjadinya penyimpangan dari tujuan yang telah ditetapkan, (2) Meningkatkan efektivitas kerja sama antar guru, peserta didik, orang tua, dan pihak lain yang terkait dengan sekolah, (3) Terwujudnya hubungan yang harmonis dan saling mendukung antara semua pihak yang berkepentingan dengan sekolah, (4) Memberikan gambaran yang jelas tentang kemajuan dan kendala dalam pelaksanaan program sekolah, (5) Menciptakan lingkungan kerja yang mendorong kreativitas, kolaborasi, dan integritas.

Berikut ini adalah tahapan-tahapan yang perlu diperhatikan dalam membuat rencana jangka menengah : (1) menunjuk kelompok kerja yang akan merumuskan arah pengembangan sekolah dalam jangka menengah, (2) menugaskan tim pengembang untuk menyusun dokumen RKJM, (3) memilih aspek-aspek yang akan menjadi perhatian utama dalam rencana jangka menengah, (4) menguji kelayakan dan melakukan penyempurnaan terhadap draf RKJM, (5) menyetujui versi final RKJM, (6) mengesahkan dokumen RKJM.

RKT (Rencana Kinerja Tahunan) merupakan dokumen perencanaan yang memuat rangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan oleh sekolah dalam jangka waktu satu tahun ke depan dengan tujuan meningkatkan mutu layanan pendidikan. Dalam rangka mempersiapkan tahun ajaran baru, seluruh satuan pendidikan akan menyelenggarakan rapat penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT). Penyusunan RKT bertujuan untuk memastikan terwujudnya perubahan yang diharapkan oleh sekolah dengan meminimalkan risiko kegagalan. RKT memiliki kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kinerja sekolah, yaitu (1) RKT berfungsi sebagai pedoman bagi sekolah dalam mencapai target peningkatan mutu pendidikan, (2) penyusunan RKT memungkinkan sekolah untuk mengakses berbagai sumber pendanaan, baik dari pemerintah maupun dari pihak swasta, (3) RKT menjadi pemicu semangat gotong royong seluruh warga sekolah untuk mencapai tujuan bersama, yaitu peningkatan kualitas pembelajaran, (4) RKT menjadi alat evaluasi yang efektif untuk mengukur sejauh mana program-program sekolah telah berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pendidikan.

Hasil evaluasi rapor pendidikan dapat digunakan sebagai input dalam merumuskan program-program yang tertuang dalam RKT sekolah. Tahap awal yang perlu dilakukan sebelum penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) adalah (1) melakukan analisis terhadap data rapor pendidikan dan evaluasi program pembelajaran yang telah dilaksanakan, (2) merumuskan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai peserta didik setiap tahun, mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik, dengan mempertimbangkan data rapor, (3) dengan mengidentifikasi area-area yang perlu diperbaiki, kita bisa membuat pembelajaran menjadi lebih efektif, (4) Menyusun rancangan pengembangan Penelitian Tindakan Kelas (PTK).

Sesuai dengan ketentuan Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007, setiap satuan pendidikan diwajibkan menyusun Rencana Kerja Sekolah (RKS) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS). Aplikasi RKAS merupakan sistem informasi berbasis

teknologi yang dirancang untuk mendukung proses penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di seluruh satuan pendidikan dasar dan menengah. Manajemen keuangan merupakan komponen integral dalam manajemen sekolah yang secara langsung mempengaruhi kualitas penyelenggaraan pendidikan. Proses manajemen keuangan meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, koordinasi, dan pengendalian. Manajemen keuangan dapat didefinisikan sebagai serangkaian aktivitas yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya keuangan sekolah, meliputi pencatatan, perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan keuangan. Sebagai lembaga pendidikan, sekolah perlu melakukan upaya peningkatan dan penyesuaian secara berkelanjutan untuk memenuhi tuntutan perkembangan zaman, baik dalam hal sarana dan prasarana, fasilitas kerja, maupun kesejahteraan tenaga pendidik (Kemendikbud, 2018).

Proses perencanaan program BOS diawali dengan pemetaan kebutuhan sekolah dan dilanjutkan dengan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang disusun oleh kepala sekolah dan tim. Tujuan utama dari identifikasi kebutuhan sekolah adalah untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai kondisi sekolah saat ini, sehingga dapat disusun rencana penggunaan dana BOS yang tepat sasaran. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah melakukan evaluasi diri. Evaluasi diri ini akan memberikan gambaran yang jelas mengenai kinerja sekolah, baik dalam hal peningkatan, keberlangsungan, maupun penurunan kinerja. Pemerintah telah memberikan kepercayaan kepada sekolah untuk mengelola dana BOS. Untuk itu, sekolah perlu secara berkala melakukan evaluasi diri untuk memastikan dana tersebut digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi diri yang telah dilakukan menjadi acuan utama dalam menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS). Dengan demikian, setiap kegiatan dan anggaran yang tercantum dalam RKAS telah mempertimbangkan kondisi riil sekolah.

Aplikasi RKAS dilengkapi dengan berbagai fitur yang memungkinkan sekolah untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi penggunaan dana BOS secara efektif dan efisien. Sistem ini memastikan bahwa laporan yang dihasilkan memiliki kualitas yang tinggi dan sesuai dengan standar yang berlaku, sehingga dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan yang lebih baik (Kemendikbud, 2018).

Sejak diluncurkan dalam program Merdeka Belajar, Kementerian Pendidikan terus meningkatkan kualitas platform ARKAS untuk mendukung tata kelola pendidikan yang lebih baik. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Dengan diluncurkannya ARKAS 4.0, Kemendikbudristek berupaya untuk memperkuat tata kelola keuangan sekolah melalui peningkatan efisiensi, akurasi, dan transparansi dalam pengelolaan dana BOS. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah mengungkapkan bahwa pada tahun 2022, ARKAS telah berhasil menjangkau lebih dari 217 ribu sekolah. Capaian yang sangat membanggakan adalah tingkat pelaporan dana BOS yang mencapai 99,8%. Hal ini menunjukkan komitmen yang tinggi dari sekolah dalam menjaga transparansi penggunaan dana BOS. Dengan diluncurkannya ARKAS 4, diharapkan proses pengelolaan anggaran sekolah dapat menjadi lebih efisien dan efektif. Pemutakhiran ini difokuskan pada penyederhanaan alur kerja dan peningkatan user experience.

ARKAS 4 telah dilengkapi dengan fitur-fitur yang inovatif, seperti perhitungan sisa anggaran otomatis dan integrasi dengan SIPLah, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan keuangan sekolah. ARKAS 4 menawarkan kenyamanan lebih kepada

pengguna dengan fitur perhitungan pajak SIPLah otomatis dan akses yang lebih mudah. ARKAS 4 telah dilengkapi dengan mekanisme keamanan yang lebih baik, seperti notifikasi error dan panduan pengisian, untuk mencegah terjadinya kesalahan dalam pengisian data. Selain itu, semua fitur yang dikembangkan telah disesuaikan dengan ketentuan Permendagri Nomor 3 Tahun 2023, sehingga memastikan pengelolaan dana BOSP sesuai dengan regulasi yang berlaku.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis pembiayaan Pendidikan di SMP Negeri 40 Kota Bandung adalah pembiayaan diperoleh dari BOS Reguler Tahun 2023 didapat dengan tiga kali pencairan yaitu bulan Maret, Agustus dan November karena masih berdasarkan cawu. Alokasi dana untuk pemenuhan kebutuhan dasar sekolah dari BOS Reguler yang meliputi: (1) Pembayaran tagihan listrik dan air untuk menjamin kelancaran proses belajar mengajar, (2) Penyediaan akses internet untuk mendukung pembelajaran berbasis teknologi, (3) Pengadaan obat-obatan dan peralatan kesehatan untuk menjaga kesehatan peserta didik dan pendidik, (4) Pembiayaan perawatan sarana dan prasarana sekolah yang berkaitan dengan kesehatan dan kebersihan.

BOS yang didapat oleh SMP Negeri 40 Kota Bandung sejumlah peserta didik di tahun 2023 yaitu 904 orang x Rp. 1.200.000,- sehingga mendapatkan Rp. 1.084.761.343, akan tetapi karena masih ada sisa saldo tahun 2022 yaitu sebesar Rp. 38.657, maka yang didapat untuk BOS adalah Rp. 1.084.761.343. Untuk dana BOS ini dipergunakan kegiatan sekolah dengan berdasarkan 7 Standar Pembiayaan yaitu pengembangan standar isi, pengembangan standar proses, pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan, pengembangan sarana dan prasarana sekolah, pengembangan standar pengelola, pengembangan standar pembiayaan, pengembangan dan implementasi sistem penilaian.

BOS yang didapat oleh SMP Negeri 40 Kota Bandung telah mencukupi untuk kegiatan operasional sehari-hari di sekolah karena telah disesuaikan dengan RAKS yang berdasarkan RKJM dan RAKT. Penggunaan dana sekolah yang telah dialokasikan untuk berbagai keperluan, seperti operasional, pemeliharaan, dan pengembangan, dengan memperhatikan efisiensi dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprima Vista, A. S. (2020). Analisis Kebijakan terkait Standar Pembiayaan pada Pendidikan Dasar. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan Volume 2 Nomor 2*, 170-175.
- Kemendikbud. (2018). ARKAS DIREKTORAT JENDERAP PENDIDIKAN USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH. <https://arkas.kemdikbud.go.id/>.
- Kuntoro, A. T. (2019). Manajemen Mutu Pendidikan Islam. *Jurnal Kependidikan*, 7(1).
- Nitiswara, N. M. (2015). ANALISIS PEMBIAYAAN PENDIDIKAN DI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) LABORATORIUM UNDIKSHA SINGARAJA TAHUN 2015. <https://media.neliti.com/media/publications/5379-ID-Vol: 5 Nomor: 1 Tahun: 2015>.
- Sudarmono, S. H. (2021). Pembiayaan Pendidikan. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 2(1), 266-280.

- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suryadi, N. N. (2020). MODEL KONSEPTUAL MANAJEMEN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN BERBASIS MUTU DI PESANTREN MODERN. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, Vol. 5, Nomor 2, Desember 2020 DOI : 10.24832/jpnk.v5i2.1629.
- Tajudin, A. &. (2020). Strategi Kepala Madrasah..dalam Membangun Budaya Religius Peserta Didik. *Munaddhomah: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 1(2), <https://doi.org/10.31538/munaddhomah.v1i2.34>, 101-110.
- UU Sisdiknas nomor 20 tahun 2003
- Yuliani, H. (2016). PEMBIAYAAN PENDIDIKAN DI SEKOLAH DASAR NEGERI NGROJO NANGGULAN KULON PROGO. <http://eprints.uny.ac.id/id/eprint/40579>.
- Yulianti, E. (2017). MANAJEMEN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN DI SMP. ejournal.unib.ac.id/index.php/manajerpendidikan, <https://doi.org/10.33369/mapen.v11i4.3290>.